

**RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BIMA  
TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KOTA BIMA  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
TAHUN 2018**

## KATA PENGANTAR

Secara Nasional dalam sepuluh tahun terakhir, konsentrasi arah pembangunan nasional telah mengalami pergeseran, yang semula dititikberatkan pada sektor pertanian dan industri, kini bergeser ke arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Hal ini dimungkinkan karena potensi kelautan dan perikanan memiliki landasan yang kuat untuk dijadikan isu utama dalam pembangunan nasional baik secara ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Beberapa landasan tersebut antara lain; **Pertama** : melimpahnya sumber daya kelautan dan perikanan yang kita miliki, dengan sejumlah keunggulan komparatif dan kompetitif yang sangat tinggi; **Kedua** : keterkaitan yang kuat antara industri yang berbasis kelautan dan industri yang berbasis ekonomi lainnya; **Ketiga** : sumber daya kelautan merupakan sumber daya yang dapat diperbaharui ; **Keempat** : luasnya perairan dengan jaminan keamanan yang cukup menjadi simbol bargaining politik luar negeri yang kuat; **Kelima** : dari aspek sosial budaya orientasi dibidang kelautan dan perikanan dapat *menggugah* bangkitnya nilai budaya dan tradisi kita sebagai masyarakat bahari.

Untuk itu dalam memaksimalkan pemanfaatan potensi SDA tersebut, perlu merancang dan merumuskan arah pembangunan melalui kepekaan dan ketajaman analisa secara matang sesuai dengan potensi dan daya dukung yang tersedia. Karena itu penyusunan Rencana Kerja (Renja) harus mempertimbangkan hasil analisa dan kajian yang komprehensif dari semua pihak, serta bercermin kepada arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) serta Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun.

Demikian kata pengantar dari kami, semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat menjadi referensi bagi kita semua dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan secara bijak dan berkesinambungan.

Raba-Bima, 29 Maret 2018

**Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan**

**Kota Bima**

**Ir. Hj. Siti Zainab**  
**Pembina Utama Muda/IVc**  
**NIP. 19621013 198903 2 002**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Adanya perhatian yang cukup besar terhadap pembangunan kelautan dan perikanan baik secara nasional maupun regional dilandasi oleh pemikiran bahwa pembangunan sektor ini sangat strategis untuk mengembangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan. Sejalan dengan itu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan desentralisasi pembangunan dengan memberikan otonomi kepada daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Otonomi daerah pada hakekatnya adalah pemberian hak kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Otonomi Daerah dapat mendorong keikutsertaan masyarakat dalam mengambil kebijakan pembangunan di daerah, pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna efisiensi dan efektivitas manajemen pemerintahan dengan memperhatikan potensi daerah baik keuangan maupun sumber daya yang dimiliki.

Untuk menjamin kegiatan pembangunan di daerah berjalan efektif, efisien dan berhasil guna maka diperlukan berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah salah satu diantaranya adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja (Renja) adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Pemerintah Daerah melalui Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan Renja SKPD yang dihasilkan melalui forum SKPD dengan cara menyerasikan substansi antar rancangan Renja masing-masing SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemuktahiran rancangan RKPD. Rancangan RKPD tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai bahan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai Forum antara pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. Setelah rancangan akhir RKPD disusun, maka Kepala Daerah menetapkan rancangan RKPD menjadi RKPD Periode 1 tahun dengan Peraturan Daerah, yang selanjutnya akan digunakan dalam menyusun RAPBD Kota Bima Tahun 2019.

Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2019 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2018-2023 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2018-2023. Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima diharapkan pembangunan dibidang kelautan dan perikanan khususnya Tahun 2019 akan semakin baik.

## **1.2 Landasan Hukum**

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025;
  12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028;
  13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Nomor Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
  14. Peraturan Walikota Bima Nomor : 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima;
  15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2017 Nomor 197).
  16. Peraturan Walikota Bima Nomor 58 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2017 Nomor 386).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Dokumen Renja ini disusun agar dapat dijadikan ,sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima selama kurun waktu Tahun 2019. Selain itu Renja disusun sebagai acuan untuk menilai dan mengevaluasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun lalu dan rencana kinerja tahun yang akan datang.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini, ditetapkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

**BAB II**

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BIMA TAHUN 2017**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2017 dan Capaian Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima**

Capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran meliputi kegiatan:
  1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
  3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
  4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
  6. Penyediaan Alat Tulis kantor
  7. Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan
  8. Penyediaan Makanan dan Minuman
  9. Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar Daerah
  10. Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah

Kinerja fisik kegiatan pada program ini seluruhnya mencapai 100% sedangkan kinerja keuangan mencapai 95,99%. Kinerja keuangan tidak terserap 100 % karena beberapa hal antara lain adanya sisa anggaran

dari kegiatan jasa surat menyurat, kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, kegiatan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional. Pelaksanaan program pelayanan administrasi perkantoran perlu dilaksanakan pada tiap tahun anggaran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur meliputi kegiatan :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
4. Pengadaan Mebeleur.
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

Kinerja fisik kegiatan pada program ini seluruhnya mencapai 100% sedangkan kinerja keuangan mencapai 99,71%. Kinerja keuangan tidak terserap 100% karena beberapa hal antara lain adanya sisa pagu dari kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional , kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor dan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas. Pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur perlu dilaksanakan pada tiap tahun anggaran.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tetentu

Kinerja fisik kegiatan pada program ini seluruhnya mencapai 100% begitu juga dengan kinerja keuangan mencapai 100 %.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur meliputi kegiatan :

1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan.

Kinerja fisik kegiatan pada program ini seluruhnya mencapai 100% begitu juga dengan kinerja keuangan mencapai 100 %. Pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur berupa sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan masih perlu dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya karena masih minimnya pengetahuan nelayan dan pembudidaya ikan tentang peraturan-peraturan tersebut.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan meliputi kegiatan :

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan laporan keuangan semesteran
3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

5. Penyusunan Rencana kerja Tahunan/RKA/DPA/ Satuan Kerja Perangkat Daerah
6. Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD.

Kinerja fisik kegiatan pada program ini seluruhnya mencapai 100% begitu juga dengan kinerja keuangan mencapai 100%. Pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan perlu dilaksanakan pada tiap tahun anggaran.
5. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
  1. Pengembangan Lanjutan Pendampingan PNPM-MKP.

Kinerja fisik kegiatan pada program ini seluruhnya mencapai 100% begitu juga dengan kinerja keuangan mencapai 98,74 %. Kinerja keuangan tidak terserap 100% karena beberapa hal antara lain adanya sisa pagu dari kegiatan pengembangan lanjutan PNPM MKP.

Output dari kegiatan ini berupa pembinaan, pendampingan dan bimbingan teknis pada kelompok-kelompok yang ada, baik penangkapan, budidaya , pengolahan maupun pengawasa. Disamping itu juga sebagai bentuk dukungan terhadap program-program yang bersumber dari dana APBN.
7. Program Peningkatan kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat dengan kegiatan Koordinasi Hari Nusantara.

Kinerja fisik kegiatan pada program ini mencapai 100% begitu juga dengan kinerja keuangan mencapai 100 %.
8. Program Pengembangan Budidaya Perikanan meliputi kegiatan :
  1. Pengadaan sarana prasarana penunjang perikanan budidaya meliputi pengadaan sarana budidaya lele di kolam terpal sebanyak 3 (tiga) paket dan pengadaan sarana budidaya nila di kolam sebanyak 14 (empat belas) paket.

Kinerja fisik kegiatan pada program ini mencapai 100% sedangkan kinerja keuangan mencapai 99,84%. Kinerja keuangan tidak terserap 100% karena adanya sisa anggaran dari kegiatan pengadaan.
10. Program Pengembangan Perikanan Tangkap meliputi kegiatan :
  1. Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Perikanan Tangkap meliputi pekerjaan pembangunan kapal < 3 GT sebanyak 8 (delapan) paket, pengadaan Gillnet 80 pic, Pengadaan life jaket sebanyak 20 (dua puluh) unit dan pengadaan alat selam sebanyak 10 (sepuluh) unit.

Kinerja fisik kegiatan pada program ini mencapai 100% sedangkan kinerja keuangan mencapai 99,72%. Kinerja keuangan tidak terserap 100% karena adanya sisa anggaran dari kegiatan pengadaan.



11. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan meliputi

kegiatan :

1. Pendataan Potensi Perikanan (Statistik)

Kinerja fisik kegiatan pada program ini mencapai 100% begitu juga dengan kinerja keuangan mencapai 100%.

2. Kontak tani nelayan

Kinerja fisik kegiatan pada program ini mencapai 100% begitu juga dengan kinerja keuangan mencapai 100%.

12. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan

meliputi kegiatan :

1. Penyediaan Sarana Prasarana Pemasaran dan Pengolahan Hasil

Perikanan meliputi pekerjaan Pemeliharaan pabrik es dan pemeliharaan cold storage 100% sedangkan kinerja keuangan mencapai 92,62%. Kinerja keuangan tidak terserap 100% karena adanya sisa anggaran dari kegiatan pengadaan.

2. Penyelenggaraan kegiatan Forum Konsumsi Ikan (FORIKAN)

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang promosi/sosialisasi tentang pemanfaatan dan pengolahan hasil perikanan.

Kinerja fisik kegiatan pada program ini mencapai 100% sedangkan kinerja keuangan mencapai 98,88%.

## **2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima**

Analisis kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

### **1. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap**

Capaian jumlah produksi perikanan tangkap Tahun 2017 adalah sebesar 1.944,30 Ton atau 99,95% dari target sebesar 1.995,34 Ton. Capaian tersebut meningkat sebesar 1,11% jika dibandingkan dengan Tahun 2016 atau meningkat 200 ton dari Tahun 2016. Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap di Kota Bima cenderung meningkat atau menunjukkan trend yang positif dimana pada setiap tahunnya mengalami pertumbuhan. Jika dibandingkan dengan target Rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2013-2018, maka capaian indikator produksi perikanan tangkap hampir memenuhi target yaitu sebesar 92,68% dari target pada tahun yang sama. Perkembangan produksi perikanan tangkap selama Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel berikut :

**CAPAIAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP**

<b>Tahun</b>	<b>JUMLAH PRODUKSI (Ton)</b>
2013	1.580,50
2014	1.630,50
2015	1.712,60
2016	1.744,60
2017	1.944,30

Meningkatnya volume produksi perikanan tangkap, pada dasarnya didorong oleh semakin tertib dan berkualitasnya pendataan statistik perikanan tangkap serta adanya program/kegiatan yang mendukung peningkatan upaya penangkapan seperti penyediaan sarana prasarana perikanan tangkap (pembangunan kapal < 3 GT sebanyak 8 (delapan) paket, pengadaan Gillnet 80 pic,). Peningkatan volume produksi ini juga tidak terlepas dari dukungan pengawasan terhadap upaya pencegahan praktek *illegal fishing*.

Peningkatan produksi perikanan tangkap masih dapat dilakukan diperairan umum daratan. Pertumbuhan penangkapan ikan dilaut disamping dibatasi oleh faktor tingkat pemanfaatan yang sudah mendekati *Maximum Sustainable Yield (MSY)*, juga dipengaruhi oleh perubahan iklim serta peraturan perundangan yang berlaku.

**2. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**

Capaian jumlah produksi perikanan budidaya pada Tahun 2017 adalah sebesar 827,72 Ton atau 86,97% dari target sebesar 951,69 Ton. Capaian ini meningkat 105,89% dibandingkan dengan Tahun 2016 atau menurun 46 ton. Jika dibandingkan dengan target Rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2013-2018, maka capaian indikator produksi perikanan budidaya pada Tahun 2017 adalah sebesar 87,06%. Produksi Perikanan Budidaya di Kota Bima cenderung stabil atau menunjukkan trend yang positif dimana pada setiap tahunnya mengalami pertumbuhan. Peningkatan volume produksi perikanan budidaya terjadi karena meningkatnya produksi ikan lele dan rumput laut. Peningkatan produksi lele terjadi karena adanya dukungan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima terkait dengan bantuan bibit ikan unggul bagi kelompok budidaya, bantuan sarana dan prasarana serta adanya Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) budidaya yang bersumber dari APBN serta semakin tingginya kesadaran pembudidaya baik lele maupun rumput laut untuk terus mengembangkan usahanya. Perkembangan produksi perikanan budidaya Tahun 2013 s/d 2017 dapat dilihat pada Tabel berikut :

**CAPAIAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA**

<b>Tahun</b>	<b>JUMLAH PRODUKSI (Ton)</b>
2013	739,80
2014	1.278,39
2015	976,70
2016	781,67
2017	827,72

**3. Tingkat Konsumsi Ikan per kapita per tahun**

Capaian Tingkat Konsumsi Ikan di Kota Bima pada Tahun 2017 adalah sebesar 38,83 kg/kapita/thn atau 98,13% dari target sebesar 39,57 kg/kapita/thn. Capaian ini meningkat 121% dibandingkan dengan Tahun 2016 atau meningkat 6,87 kg. Jika dibandingkan dengan target Rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2013-2018, maka capaian indikator Tingkat Konsumsi Ikan Kota Bima pada Tahun 2017 adalah sebesar 98,13% atau sudah memenuhi target indikator pada tahun yang sama. Tingkat Konsumsi Ikan di Kota Bima cenderung meningkat atau menunjukkan trend yang positif dimana pada setiap tahunnya mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan yang cukup signifikan terjadi pada Tahun 2014 dan tahun 2017. hal ini terjadi karena adanya program/kegiatan yang mendukung pengolahan dan pemasaran seperti penyediaan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil yang bersumber dari APBD II serta adanya dukungan dana dari APBN. Disamping itu, peningkatan jumlah konsumsi ikan disebabkan karena semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi ikan terutama ikan segar. Perkembangan tingkat konsumsi ikan selama kurun waktu 2013 s/d 2017 dapat dilihat pada Tabel berikut:

**CAPAIAN TINGKAT KONSUMSI IKAN**

<b>Tahun</b>	<b>Tingkat Konsumsi Ikan (Kg Per Kapita)</b>
2013	31,74
2014	35,35
2015	33,90
2016	31,96
2017	38,83

**4. Jumlah Produk Pengolahan Hasil Perikanan**

Capaian jumlah produk olahan hasil perikanan di Kota Bima pada Tahun 2017 adalah sebesar 1.576,43 ton atau 111,41% dari target sebesar 1.415 ton/tahun. Jika dibandingkan dengan target Tahun 2016, capaian

kinerja meningkat 161 ton, disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adanya penambahan indikator pengukuran jumlah produk olahan yang sebelumnya tidak diperhitungkan, termasuk didalamnya pengesan. Jika dibandingkan dengan target Rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2013-2018, maka capaian indikator Jumlah Produk Olahan pada Tahun 2017 adalah sebesar 7,56% atau belum memenuhi target. Rendahnya capaian kinerja pada jumlah produk olahan disebabkan karena masih rendahnya kualitas SDM kelompok pengolahan, dimana pada umumnya hasil kelautan dan perikanan belum diolah seoptimal mungkin sehingga keberagaman produk masih sangat minim.

Pengembangan produk hasil perikanan yang bernilai tambah merupakan suatu hal yang harus terus dilakukan, hal ini disebabkan karena adanya beberapa pergeseran yang terjadi di masyarakat antara lain adanya perubahan gaya hidup, perubahan pola konsumsi, banyaknya wanita/ibu rumah tangga yang bekerja, konsumen yang lebih menyukai produk yang lebih praktis, daya simpan produk olahan lebih lama dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka untuk tahun berikutnya peningkatan produk olahan akan dilakukan melalui beberapa cara antara lain lebih mengintensifkan pembinaan pada kelompok pengolahan yang ada baik melalui pembinaan rutin maupun Bimbingan Teknik atau pelatihan-pelatihan, promosi produk olahan baik skala lokal maupun nasional, pembentukan kelompok-kelompok pengolahan yang baru serta mengaktifkan kembali kelompok-kelompok yang sudah non aktif.

#### **CAPAIAN BERDASARKAN JUMLAH PRODUK OLAHAN HASIL PERIKANAN**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton)</b>
2012	11,63
2013	16,99
2014	4.497,60
2015	3.870,91
2016	1.415,83
2017	1.576,43

#### **5. Jumlah Kelompok Pemula**

Capaian kinerja terhadap jumlah kelompok pemula pada Tahun 2017 dari target 8 kelompok terealisasi 10 kelompok atau 112%.

## **6. Jumlah Kelompok Madya**

Capaian kinerja terhadap jumlah kelompok madya pada Tahun 2017 dari target 5 kelompok terealisasi 6 kelompok atau 120%.

## **7. Jumlah Kelompok Utama**

Capaian kinerja terhadap jumlah kelompok Utama pada Tahun 2017 dari target 5 kelompok terealisasi 6 kelompok atau 120%.

Untuk analisis terhadap capaian kinerja terhadap peningkatan jumlah kelompok baik pemula, madya maupun utama rata-rata mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2016, rata-rata capaian indikator cakupan bina kelompok kelautan dan perikanan pada Tahun 2017 naik sebanyak 4 kelompok atau sebesar 22%. Jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2013-2018, maka capaian indikator pada Tahun 2017 sudah memenuhi target, yaitu masing-masing sebesar 100% baik kelas pemula, madya maupun utama.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima**

Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima yaitu :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dibandingkan dengan luas wilayah Kota Bima yang cukup luas.
2. Harus jelasnya target/sasaran program/kegiatan sehingga tidak terjadi salah sasaran.
3. Peningkatan produksi dan produktivitas pembibitan/pembenihan sehingga bisa menghasilkan bibit unggul/benih unggul lokal.
4. Pengembangan sistem budidaya perikanan yang mampu meningkatkan produksi sehingga bisa secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan dari luar daerah.
5. Peningkatan teknologi perikanan tepat guna di masyarakat sehingga dapat memudahkan dalam budidaya ikan.
6. Peningkatan pemasaran dengan pangan olahan hasil ikan yang bervariasi.
7. Peningkatan kelembagaan yang mendukung produktivitas usaha perikanan.
8. Pengembangan infrastruktur dibidang kelautan dan perikanan yang mendukung upaya pembibitan, budidaya, penangkapan, pengolahan, pemasaran dan pengelolaan wilayah pesisir.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam rancangan awal RKPD diambil berdasarkan analisis kebutuhan dari tiap bidang yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima. Namun, seiring dengan berjalannya waktu terdapat perubahan-perubahan kegiatan karena disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang diprioritaskan.

Pada saat proses penginputan program dan kegiatan terdapat program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, sehingga diperlukan penyesuaian rumusan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renstra SKPD dan RPJMD. Disamping itu, juga karena ada beberapa kegiatan yang mengalami rasionalisasi anggaran pada saat APBD Perubahan.

#### **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan Program dan Kegiatan yang datang dari masyarakat di peroleh melalui Proposal yang diantar/diajukan langsung oleh masyarakat/kelompok ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima.

Pada Umumnya Usulan-usulan yang berupa proposal yang datang dari kelompok-kelompok tersebut sangat sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima.

### BAB III

#### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

##### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam sepuluh tahun terakhir, konsentrasi arah pembangunan nasional telah mengalami pergeseran, yang semula dititikberatkan pada sektor pertanian dan industri, kini bergeser ke arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Dilihat dari segi ketersediaan sumber daya alam, sektor kelautan dan perikanan merupakan aset yang paling menguntungkan. Di sepanjang pantai sering terdapat hutan bakau dan akar nafasnya yang khas. Ekosistem laut sebagai tempat hidup berbagai flora dan fauna laut, membentuk keanekaragaman hayati yang tinggi. Di dalam perairan laut biasanya juga terdapat jejeran terumbu karang dan padang lamun yang sangat beraneka ragam. Potensi ini menjadi indikator bagi kelimpahan potensi ikan, karena merupakan habitat dan tempat berlindung bagi ikan dan biota laut lainnya. Selain itu keindahan terumbu karang juga dapat memberikan daya tarik tersendiri bagi pengembangan wisata bahari.

Potensi kelautan dan perikanan memiliki landasan yang kuat untuk dijadikan isu utama dalam pembangunan nasional baik secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Beberapa landasan tersebut antara lain; (1) Melimpahnya sumber daya kelautan dan perikanan yang kita miliki, dengan sejumlah keunggulan komparatif dan kompetitif yang sangat tinggi; (2) Keterkaitan yang kuat antara industri yang berbasis kelautan dan industri yang berbasis ekonomi lainnya; (3) Sumber daya kelautan merupakan sumber daya yang dapat diperbaharui; (4) Luasnya perairan dengan jaminan keamanan yang cukup menjadi simbol bargaining politik luar negeri yang kuat; (5) Dari aspek sosial budaya orientasi di bidang kelautan dan perikanan dapat menggugah bangkitnya nilai budaya dan tradisi kita sebagai masyarakat bahari.

Meskipun demikian, kerusakan di sektor kelautan dan perikanan yang terus menurun daya dukungnya, menjadi masalah yang cukup sulit untuk diselesaikan. Berbagai macam bahan pencemar dari sungai, daratan atau lautan dapat mencemari pantai. Sungai yang bermuara di laut membawa berbagai macam limbah padat, cair, bahan berbahaya dan beracun (B3), sampah dan sebagainya. Selain itu eksploitasi dan eksplorasi sumber daya kelautan dan perikanan yang dilakukan secara destruktif dan tidak bertanggung jawab oleh manusia dan tenaga asing telah menyebabkan potensi tersebut telah mengalami degradasi yang cukup signifikan, sehingga semakin memperparah rusaknya ekosistem laut dan pesisir serta menurunnya biota-biota laut.

Fenomena ini berdampak pada semakin menurunnya hasil penangkapan ikan para nelayan. Para nelayan yang biasanya cukup dengan menangkap ikan di sekitar perairan atau teluk terdekat kini harus berjuang keras dan mencari ikan pada laut lepas. Tentu saja dengan peralatan atau sarana dan prasarana yang sangat terbatas menjadi pembatas dalam perolehan ikan bagi nelayan kecil. Kenyataan ini mengharuskan kita untuk terus memperhatikan dan menjadikan sektor kelautan dan perikanan dan perairannya sebagai potensi yang vital untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendapatkan perlindungan, pengawasan dari pemerintah dan masyarakat setempat.

Secara nasional kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan telah diarahkan untuk : (1) Pengentasan kemiskinan (*pro poor*); (2) Penciptaan Lapangan kerja (*pro job*); (3) Percepatan pertumbuhan (*pro growth*); (4) Pengembangan agribisnis (*pro bussines*); dan (5) Pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable development*). Bahkan untuk pembangunan Kawasan Timur Indonesia yang sebagian besar merupakan daerah kepulauan, pembangunan sektor kelautan mendapat prioritas cukup tinggi dan menjadi salah satu andalan sebagai motor penggerak perekonomian regional maupun nasional.

Secara Fisik, Provinsi NTB memiliki potensi pembangunan kelautan dan perikanan yang cukup menjanjikan dengan luas perairan laut ± 29.159,04 km, (sedangkan luas wilayah darat 20.153,15 km<sup>2</sup>), dan panjang garis pantai sekitar 2.333 km. Dengan kondisi perairan laut yang pada umumnya masih bersih, provinsi NTB memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan perikanan budidaya, baik untuk budidaya laut maupun budidaya tambak (*Marineculture*).

Disisi lain rata-rata luas pemilikan lahan pertanian hanya sekitar 0,3 HA per KK sehingga kurang mampu memberikan pendapatan yang layak bagi masyarakat. Fakta tersebut merupakan isyarat bahwa kita harus berpaling ke laut, sehingga sektor kelautan menjadi andalan NTB di masa depan. Namun demikian saat ini, pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di NTB belum optimal karena beberapa faktor yaitu : (1) Masih rendahnya kualitas SDM yang antara lain tercermin dari cara-cara pemanfaatan yang masih tergolong tradisional dan belum didukung oleh sistem pengolahan dan strategi pemasaran hasil perikanan yang memadai. (2) Terbatasnya sarana dan parasarana penunjang perikanan dan kelautan. (3) Terbatasnya akses untuk memperoleh permodalan, (4) Masih berlangsungnya pola pemanfaatan sumberdaya dengan cara-cara yang merusak kelestarian sumberdaya dan lingkungan hidup.

Pemberlakuan otonomi daerah, diharapkan menjadi peluang yang lebih strategis bagi Daerah, dalam rangka penataan, pengelolaan, eksplorasi,



eksploitasi, pengawasan, dan konservasi wilayah sumberdaya kelautan dan perikanan.

Pemerintah Daerah Kota Bima memiliki panjang garis pantai sekitar 27,7 km dengan luas daerah konservasi 256 Ha, luas daerah budidaya laut 710 Ha, luas daerah budidaya air tawar 365 Ha, luas daerah budidaya air payau 350 Ha. Tingginya potensi tersebut memungkinkan dijadikannya sektor Kelautan dan Perikanan Kota Bima sebagai basis pengembangan agro bisnis di daerah.

Dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima melaksanakan beberapa strategi dan kebijakan antara lain :

**a. Strategi :**

1. Fasilitasi sarana dan prasarana kelautan dan perikanan
2. Mengintensifkan pembinaan dan penyuluhan.
3. Mengintensifkan perlindungan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

**b. Kebijakan :**

1. Pengembangan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
2. Revitalisasi kelautan dan perikanan.

**3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima**

**a. Tujuan**

Adapun tujuan renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima yaitu:

1. Meningkatkan produksi perikanan.
2. Mengembangkan industri hasil pengolahan yang berdaya saing.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas masyarakat kelautan dan perikanan.

**b. Sasaran**

Adapun sasaran renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima yaitu :

1. Meningkatkan Produksi Perikanan
2. Terciptanya peningkatan daya saing produk perikanan
3. Tercapainya peningkatan kelas kelompok perikanan

**3.3 Program dan Kegiatan**

Untuk mengoptimalkan arah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima selama satu tahun ke depan (2016), perlu dipertajam dengan merumuskan visi dan misi. Visi dan misi tersebut harus berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan, atau sebagai sebuah tatanan yang secara progresif ingin dicapai secara tanggungjawab, komprehensif, terukur, efektif dan efisien.

Adapun visi pembangunan Dinas kelautan dan perikanan Kota Bima yaitu ***“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan Kota Bima yang Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”***.

Untuk mewujudkan visi, diperlukan langkah-langkah yang dijabarkan dalam dalam misi pembangunan kelautan dan perikanan Kota Bima yaitu :

- a. Mewujudkan peningkatan produksi perikanan.
- b. Mewujudkan produk kelautan dan perikanan yang berkualitas dan berdaya saing serta memiliki nilai tambah.
- c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan.

Agar visi dan misi dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima merencanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja). Adapun Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pembangunan Gedung Kantor
- Pengadaan Mebeleur
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- Pengadaan Pakaian Olah Raga

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
  - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
  - Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
  - Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA/DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah
  - Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD
6. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
- Pengembangan Lanjutan Pendampingan PNPM MKP
7. Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan wawasan Maritim Kepada Masyarakat
- Koordinasi Hari Nusantara
8. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
- Pengembangan Bibit Ikan Unggul
  - Pendampingan pada Kelompok Pembudidaya Ikan (Sehatkan)
  - Pengadaan Sarana Pengembangan Kebun Rumput Laut Metode Long Line dan Rakit Apung
  - Pembangunan/Rehab Sarana Prasarana Fisik UPR dan HSRT
  - Penyediaan Sarana Prasarana Penunjang Perikanan Budidaya
  - Revitalisasi Kelompok Perikanan Budidaya
  - Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan
9. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- Pendampingan pada kelompok nelayan Perikanan Tangkap
  - Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap
  - Pengadaan Sarana/Prasarana Pendukung Perikanan Tangkap
  - Penandaan Kapal Perikanan Tangkap
  - Pendampingan Perizinan Kapal Perikanan Lebih Kecil dari 7 GT
  - Revitalisasi Kelompok Perikanan Tangkap
  - Pelatihan Perbengkelan Nelayan
  - Pelatihan Penggunaan Alat Navigasi dan Alat Bantu Penangkap Ikan
10. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
- Pendataan Potensi Perikanan (Statistik)
11. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan

- Kajian Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan
- Penyediaan Sarana Prasarana Pemasaran dan Pengolahan Hasil
- Penyelenggaraan Kegiatan Forum Konsumsi Ikan (FORIKAN)
- Revitalisasi Kelompok Pengolahan
- Penguatan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan
- Peningkatan Akses Pasar, Promosi dan Investasi
- Bina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
- Pelatihan Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan

Adapun rincian rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2019 terlampir.



**BAB IV**

**PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2019 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2019 ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima. Dalam melaksanakan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2019 ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Raba – Bima, 29 Maret 2018

**Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Kota Bima**

**Ir. Hj. Siti Zainab  
Pembina Utama Muda/IVc  
NIP. 19621013 198903 2 002**